



Peranan Abdul Haris Nasution dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1950

Burhanuddin*

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Graha Nusantara,
Padangsidempuan, Indonesia
Email: bunasty1965@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: 30-12-2023 Revised: 15-01-2024 Published: 31-01-2024 Keywords: <i>Abdul Haris Nasution Indonesia Independence</i>	<i>This study aims to describe articles which related to the development of learning design. It uses a meta-analysis method by using sample of 30 international articles. This meta-analysis research shows the importance of developing learning design such a developing online-offline learning media. While, the learning media which are used related to the students and learning materials' problems. Based on the data analysis results, they are showed 80% of problems are related to the lack of students' interest in learning, low of students' learning outcomes and techniques used by teachers are not adequate for teaching and learning process. The results show that researchers used online media such as e-learning, e-comic, internet-based economics, and 3D animation. The using offline media like applying jigsaw and whole brain techniques. The advantages of using learning media are increasing learning outcomes, learning motivation and students' understanding.</i>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan Jenderal Abdul Haris Nasution dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1950. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara melakukan analisis situasi melalui buku-buku di perpustakaan Universitas Graha Nusantara. Melalui penelitian ini diperoleh data bahwa Peranan A.H Nasution selama menjabat di militer sangat jelas seperti sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), Menteri Keamanan Nasional, Ketua panitia undang-undang pokok Kepolisian dan Kejaksaan, Ketua panitia retooling aparatur negara, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil menteri pertama pertahanan/ keamanan, Wakil panglima besar komando tertinggi pembebasan Irian Barat, Penasehat agung majelis mahasiswa Indonesia, Wakil ketua pengurus besar prout nasional. A.H Nasution juga menggagas dengan mempelopori kembali kepada UUD 1945. Usul Nasution pada bulan agustus 1958 di dewan nasional agar UUD '45 diperlakukan kembali.

Kata Kunci : Abdul Haris Nasution, Indonesia, Kemerdekaan

PENDAHULUAN

Jenderal Abdul Haris Nasution adalah salah satu tokoh penting di kalangan militer yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia juga seorang pahlawan nasional yang merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965, namun yang menjadi korban adalah putrinya Ade Irma Suryani Nasution. (Seobandrio, 2001), mengatakan sebelum peristiwa Gerakan.30 September Partai Komunis Indonesia (G.30 S-PKI) terjadi A.H Nasution adalah perwira paling tinggi pangkatnya, saat itu dia sedang menyandang bintang empat, sedangkan Soeharto masih bintang tiga.

Disaat TNI /AD terpecah (secara tidak transparan) dalam kubu-kubu di tahun 1960 an, kubu Nasution di takuti oleh kubu Yani dan kubu Soeharto. Banyak politikus saat itu mengatakan bawa Letjen TNI A.H Nasution paling pantas menggantikan Presiden Soekarno. Dia terkenal anti PKI, memiliki dedikasi yang tinggi dan termasuk Jenderal yang diculik pelaku G30 S. Disamping itu pula yang tidak banyak diketahui oleh orang

adalah bahwa dari sekian perwira senior yang paling disegani Presiden Soekarno saat itu adalah Nasution. Presiden Soekarno menjuluki Nasution sebagai pencetus gagasan Negara dalam Negara. Atas jabatan dan peranannya yang besar dalam TNI dan pemerintahan maka A.H Nasution merupakan salah satu tokoh penting yang di butuhkan dan segani oleh petinggi-petinggi Negara seperti Presiden Soekarno dan Jenderal lainnya.

A.H Nasution dilahirkan di Huta Pungkut, Kesamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Dulu Tapanuli Selatan) pada tanggal 3 Desember 1918. A.H. Nasution merupakan seorang figur TNI Angkatan Darat yang menonjol dan amat berjasa tidak saja bagi sejarah TNI melainkan juga kepada tanah air, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana Jenderal besar Sudirman, Nasution merupakan seorang tokoh TNI AD juga peletak dasar konsep-konsep kemiliteran. Pemikiran-pemikiran Nasution tentang peran politik militer lahir ditengah konflik sipil-militer pasca kemerdekaan.

Militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) semenjak zaman kelahirannya tak dapat di katakan sebangai pihak yang mengakui keberadaan supremasi sipil, bahkan pemerintahan sipil yang tengah berkuasa. Menuliskan sejarah mengenai tokoh bukanlah hal yang mudah karena diperlukan kecermatan dan kegigihan untuk menampilkan Sang tokoh apa adanya, sehingga sejawaran yang meneliti bisa menilai secara objektif dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Bagi sejawaran yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan salah satu babak kejadian yang terpenting. Kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga dapat di harapkan sejarawan akan mengungkapkan secara objektif.

Bagi sejawaran sangat penting untuk menyadari bahwa wujud dan cita-cita serta nilai-nilai bangsanya tidak bisa di mengerti tanpa referensi kepada sejarah dan pengalaman bangsa itu. Maka usaha untuk mengungkapkan bagaimana sejarah serta pandangan mengenai hari depan saling kait mengait satu sama lain dalam sejarah manusia, kenyataan hari ini merupakan inti sari dari pada tanggung jawab para ahli sejarah. Abdul Haris Nasution merupakan salah seorang tokoh yang begitu banyak menyumbangkan pemikirannya bagi bangsa Indonesia, memiliki peranan yang begitu penting sebelum atau pun sesudah diproklamasikanya kemerdekaan antara lain menjadi pemimpin dalam upaya menumpas PPRI di Sumatera dan operasi merdeka di Sulawesi Utara. Sebutan orde lama muncul dan tercipta pada masa orde baru yang sering di ucapkan oleh A.H Nasution dan Soeharto yang merupakan sebuah istilah stigmatic untuk menandai mulainya masa orde baru dalam masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan rezim pemerintahan Soekarno.

Sebagai seorang petinggi ABRI, A.H Nasution memiliki peranan yang sangat banyak pada masa orde lama karena ia banyak menciptakan ide-ide dan gagasan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang pertahanan, dimana ide dan gagasannya ini di pakai secara luas di berbangai kalangan seperti Tentara Republik Indonesia dan Tentara Negara lain seperti Amerika Serikat. A.H Nasution juga menjadi tonggak lahirnya orde baru yang di pimpin oleh Soeharto. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul: Peranan Abdul Haris Nasution Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1950.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada perpustakaan di Kabupaten Mandailing Natal dan Perpustakaan Universitas Graha Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk kemudian di olah menjadi hasil penelitian. Instrument manusia yang beroperasi dalam situasi yang tidak ditentukan, di mana peneliti memasuki perpustakaan serta lapangan yang terbuka, sehingga mengetahui apa yang tidak di ketahui. Untuk itu, peneliti dalam penelitian mengandalkan teknik-teknik kualitatif penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah buku-buku (referensi) yang relevan dengan judul.

Pelaksanaan penelitian tidak bersipat eksternal, melainkan bersipat internal yaitu peneliti sendiri sebagai instrument (*human instrument*). Untuk semua penelitian naturalistic, evaluasi atau analisis keijakan sangat bermamfaat apabila instrument manusia di organisasi dalam satu tim, dengan keuntungan-keuntungan dalam hal peran, perspektif nilai, strategi, metodologi, cek interal dan saling mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Dalam Bidang Militer

Sejak awal berdirinya, tentara Indonesia telah terlibat dalam bidang politik, karena dihadapkan pada kondisi nyata yang mengharuskannya. Pada masa perang kemerdekaan, peranan militer sangat berpengaruh dalam kemajuan bangsa. Sifat kesemestaan perang pada masa itu menuntut mengurangi bidang politik, ekonomi, sosial dan militer. Jalanya perjuangan kemerdekaan, terutama sesudah serangan militer yang kedua dimana hampir semua pemimpin-pemimpin politik tertawan atau tidak dapat lagi berbuat apa-apa, sedangkan angkatan perang melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat di desa-desa, yang biasa disebut dengan perang gerilya.

Tugas militer dalam hubungan usaha-usaha untuk memulihkan keamanan terutama terletak di atas bahu angkatan darat, walaupun tugas-tugas Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga tidak bisa diabaikan. Angkatan Udara menjalankan tugas-tugas dalam pengangkutan, pengintaian dan tugas-tugas menjatuhkan perlengkapan ke pos-pos Angkatan Darat yang sulit dijangkau melalui jalan darat (T.B. Simatupang, 1981).

Abdul Haris Nasution memulainya karirnya di bidang militer pada tahun 1940 ketika di bentuk suatu badan yang bernama *Corps Opleiding Reserve Offcieren (CORO)* yaitu suatu *Korps* Pendidikan Perwira-perwira Cadangan yang mengijinkan putera-putera Indonesia ikut dalam pendidikan itu yang berijazah HSB atau AMS (Nasution, 1984:43). Karirnya terus berkembang hingga akhirnya ia menjadi Jenderal Besar TNI. Selama menjabat sebagai militer ia memiliki peranan yang penting mempertahankan kedaulatan Indonesia diantaranya memimpin divisi siliwangi dalam revolusi kemerdekaan I (1948-1949), ketika memimpin divisi siliwangi, pak Nas menarik perjalanan kedua. Rakyat mendukung TNI. Dari sini lahir gagasannya tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dengan leluasa di kembangkannya setelah Nasution menjadi panglima komando jawa dalam masa revolusi kemerdekaan II (1948-1949).

Pada bulan juli 1966, Jenderal Abdul Haris Nasution, seorang perwira senior militer dari angkatan darat yang sejak tahun 1956 dan juga pada masa 1950-1952 telah aktif memimpin dan memberikan doktrin-doktrin politik militer secara aklamasi dipilih menjadi ketua majelis permusyawaratan rakyat sementara yang merupakan lembaga legislatif tertinggi. (Muhaimin, 2005). Disamping itu Nasution memegang berbagai

janatan penting di militer seperti, (1) Sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB);(2) Kepala Staf Angkatan Darat; (3) Wakil Menteri Pertahanan/Keamanan; (4) Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan (5) Menteri Keamanan Nasional

2. Peranan Dalam Bidang Politik

Setiap Negara di dunia mempunyai periode kepemimpinan politik yang beragam. Kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal awal terbentuknya system politik, konfigurasi politik yang ada pada periode orde lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Pada masa ini pula politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.

Ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak pada kehidupan politik atau system politik, bukan pada militer, dan dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, rangkaian sebab yang menyangkut adanya ketidakstabilan sistem politik. Keadaan seperti ini akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar untuk menggunakan kekerasan di kehidupan politik. Kedua, rangkaian sebab-sebab yang bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfer kehidupan politik, bahkan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan, dominasi militer di dalam politik justru" atau di permudah oleh golongan sipil. Ketiga, rangkaian sebab yang berhubungan dengan *political perspectives* kaum militer (Muhaimin, 2005).

Pada hakekatnya partai politik itu adalah alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar rakyat belajar merasa tanggung jawab sebagai pengatur Negara untuk melayani aspirasi rakyat dalam arti keseluruhan dengan tidak membedakan golongan-golongan tertentu. Pada bulan Juli 1958 militer diakui sebagai kekuasaan politik "golongan fungsional" dan wakil-wakil militer berhasil didudukkan dan Lembaga Negara Dewan Nasional yang di bentuk oleh pemerintah berdasar SOB. Semenjak masa itu dengan cepat partisipasi militer di dalam politik dan pemerintahan menjadi semakin mantap, terutama sesudah militer dalam waktu singkat berhasil mengatasi krisis nasional pemberontakan "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" mengakibatkan tersingkirnya kelompok perwira "Radikal" dalam tubuh militer angkatan darat tampilnya Jenderal Nasution secara dominan dalam percaturan politik nasional sebagai pimpinan militer. Pada saat ini dalam kerangka hubungan-hubungan antara militer melakukan political switch dari penganut garis radikal ke garis moderat.

Politik moderat inilah yang sejak saat itu dianut oleh pimpinan militer sebagai salah satu kekuatan politik dari golongan fungsional pada tahun 1966 memberikan hasil yang gemilang bagi militer, terutama dengan diakuinya golongan militer sebagai salah satu kekuatan politik dari golongan fungsional pada tahun 1958 dalam kehidupan politik nasional sejajar dengan partai-partai politik. Sejak tahun 1959 wakil-wakil militer menduduki posisi penting dalam kabinet di bawah Presiden Sukarno, seperti menteri pertahanan (Muhaimin, 2005). Disamping itu Nasution mempunyai kedudukan penting dalam berbagai organisasi seperti, (1) Penasehat Agung Majelis Mahasiswa Indonesia; (2) Wakil Ketua Pengurus Besar Pront Nasional; (3) Ketua Panitia Pembuatan UU Pokok Kepolisian dan Kejaksaan dan (4) Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara

3. Mempelopori Kembali Kepada UUD 1945

Undang – undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (*basic of law*), konsitusi pemerintahan Negara republic Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebangai undang – undang dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945. Sejak tanggal 27 desember 1949, di Indonesia berlaku konsitusi RIS, dan sejak tanggal 17 agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Pada periode UUDS 1950 (17 agustus 1950 – 5 juli 1959) ini diberlakukan system demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Usul Nasution pada bulan agustus 1958, di dewan nasional agar UUD '45 diperlakukan kembali, pada mulanya tidak mendapat tanggapan yang positif dari siding dewan pada umumnya. Pertimbangan Soekarno itu mungkin karena Soekarno tidak merasa mampu memikul tanggung jawab jabatan Presiden di bawah UUD '45, dan mungkin pula Soekarno takut tidak bisa mengimbangi dan menguasai peranan TNI selama peranan partai-partai politik belum dilemahkan. Tetapi setelah partai-partai di parlemen dengan keras menentang di lakukanya reformasi parlemen secara drastis, yaitu agar sepertiga anggota parlemen harus dari golongan fungsionil, karena momentum inilah kemudian dewan nasional mengambil keputusan untuk kembali memakai UUD '45 sebagai pelaksana demokrasi terpimpin nanti (Muhaimin, 2005).

Setelah Negara republic Indonesia dengan UUD 1950 dan sistem demokrasi liberal yang di alami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUD 1950 dengan system demokrasi liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa pancasila dan UUD 1945. Pelaksana UUDS 50 itu tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan kartatanegara Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara serta merintangai pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga pada tanggal 5 juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Karena situasi politik pada siding konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka tanggal 5 juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebangai undang-undang dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Keputusan itu kemudian diajukan kepada kabinet juanda. Pada tanggal 1959, kabinet dengan suara bulat menyetujui keputusan tersebut, dan perdana menteri djuanda pada tanggal 2 maret mengucapkan keputusan kembali ke UUD '45. Tetapi hingga bulan juni, konstituante tidak bisa mengambil keputusan juga mengenai anjuran kembali ke UUD'45, walaupun telah melakukan serangkaian perdebatan yang lama.

Keadaan dikonstituante menimbulkan situasi yang relative gawat. Situasi itu dijadikan oleh KSAD Nasution sebangai penguasa perang pusat di bawah SOB untuk mengeluarkan peraturan guna membatasi segala kegiatan politik sampai menunggu kembalinya Presiden Soekarno yang sedang berkeliling diluar negeri dua bulan sejak mei. Peraturan "peperpu / 040/1959 tanggal 3 juni 1959" itu dimaksudkan oleh Nasution untuk mencegah meledaknya " political temper" menjadi tindakan kekerasan, terutama yang telah terjadi di Jawa Barat antara kelompok pemuda islam dengan kelompok pemuda komunis.

Pada tanggal 29 juni, Soekarno pulang keluar negeri, dan pada hari itu juga Nasution mengadakan pertemuan dengan seluruh komandan militer yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada soekarno adanya kesatuan TNI-AD menghendaki dan mendukung UUD'45 diberlakukan kembali serta menghendaki pembentukan suatu platform tertentu dalam pemerintahan baru. Tanggal 2 juli, Soekarno menerima kembali jabatan kepresidenannya dan sehari kemudian memberi tahu kabinet, bahwa dia akan memaklumkan berlakunya kembali UUD '45 dengan sebuah dekrit yang antara lain menyatakan bahwa konstituante dibubarkan dan bahwa UUD- S 1950 tidak berlaku lagi serta berlakunya kembali UUD '45, menggantikan UUD-S 1950. Presiden Soekarno, yang dengan berlakunya kembali UUD'45 telah menjadi pemegang kekuasaan politik dan pemerintahan, menyatakan bahwa dia akan membentuk suatu kabinet atas dasar efisiensi, efektif, dan mampu menanggulangi masalah-masalah nasional (Muhaimin, 2005).

(Nasution, 1984) memelopori kembalinya kepada undang-undang dasar bukan hanya kepada para pemimpin maupun petinggi negara seperti dalam rapat-rapat maupun pertemuan antara petinggi tetapi juga acara-acara yang dihadiri oleh Nasution seperti dalam ceramah Nasution di hadapan persatuan wartawan Indonesia (PWI) pada 1 April 1966 yaitu: Dalam memenuhi permintaan saudara - saudara, saya pilih judul ABRI dan UUD 45 dalam memuncaknya kegawatan - kegawatan social politik dan ekonomi belakangan ini, maka lahirlah gagasan - gagasan dan kekuatan - kekuatan pendobrak. Gagasan "kembalikan UUD 45 secara konsekuen", baik idiil maupun struktual, kembalikan revolusi terhadap rel aslinya, rel UUD 45'. "koreksi semua penyelewengan terhadap UUD 45, dan lain-lain seterusnya.

Dalam rangka itu DPRGR menuntut fungsi dan wewenangnya kembali menurut huruf dan isi UUD 45. Sebagai rakyat, terutama angkatan pendobrak baru, yang mulai memakai nama angkatan 66, menuntut kembalinya UUD 45 dilaksanakan konsekuen untuk penyalur control dan peranan rakyat yang wajar. Waperdam idham cholid meminta MPRS, sebagai lembaga kekuasaan tertinggi menurut UUD 45, secepatnya bersidang untuk melakukan kewajiban sesuai UUD 45. Potensi baru, dipelopori oleh KAMI/KAPI dan disokong oleh banyak pekerja, prajurit, ibu bapak lainnya, mendobrak imobolitas angkatan 45, imobilitas yang di sebabkan oleh berbagai vested interest dan mendobrak untuk kemurnian pelaksana ampere, walaupun aksi-aksinya tentu tidak luput dari berbagai usaha untuk tunggangan dan ekkses-ekksesnya di sana-sini.

Sesungguhnya UUD 45 telah berkali-kali diselewengkan, dan pada puncak - puncak kesulitan dalam revolusi teringat kita kembali kepadanya, sebagai jalan yang sewajibnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang gawat. Saya ingatkan ke tahun 1948 setelah "renville" dimana RI kita jadi tinggal kecil dan terkepung total oleh kolonialis Belanda baik militer, maupun politik ekonomis. Presiden menyusun kabinet menurut UUD 45. Inggatkan kepada tahun 1958 setelah ekkses-ekkses liberalism yang menyeleweng dari UUD 45, hampir pula meruntuhkan RI proklamasi. Panji" kembali ke UUD 45 "berkibar kembali setinggi - tingginya, dan kita laksanakan dengan dekrit presiden 5 juli 1959. Maka kstabilan politik tercapai dan dari triprogram waktu itu dapat sukses dua program, yaitu keamanan Irian Barat.

KESIMPULAN

Jenderal Abdul Haris Nasution lahir dari pasangan suami istri H. Abdul Halim Nasution dan Hj. Zahara lubis di Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal pada 3 Desember 1918 di desa Huta Pungkut. Di tahun 1931 Nasution meninggalkan

kampungnya, karena ia naik kelas 7 HIS dan juga masuk "Sekolah Sore". Nasution diterima masuk guru di Bukit Tinggi yang waktu itu di kenal dengan nama "Sekolah Raja". Ayah Nasution di masa mudanya adalah pengikut Sarikat Islam dan ia adalah pengagum perjuangan kebangkitan Islam dan kebangkitan Turki. Peranan A.H Nasution selama menjabat di militer sangat jelas seperti sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), Menteri Keamanan Nasional, Ketua panitia undang-undang pokok Kepolisian dan Kejaksaan, Ketua panitia retooling aparatur negara, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil menteri pertama pertahanan/ keamanan, Wakil panglima besar komando tertinggi pembebasan Irian Barat, Penasehat agung majelis mahasiswa Indonesia, Wakil ketua pengurus besar prout nasional. A.H Nasution juga menggagas dengan memelopori kembali kepada UUD 1945. Usul Nasution pada bulan agustus 1958 di dewan nasional agar UUD '45 diperlakukan kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada civitas Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan khususnya Perpustakaan Universitas yang telah memberikan dukugan dalam pengerjaan penelitian ini sampai selesai.

REFERENCES

- Asep Saeful Muhtadi, (2008). *Komunikasi Politik Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Crouch, Harold, (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: P.T. Aksara Perkasa.
- Irawan Suhartono, (2002). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael Rush, Philip Althoff, (2002). *Sosialisasi Politik*, Jakarta: Usaha Nasional.
- Miftah, Thoha, (2007). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin.Yahya.A. (2005). *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966*.Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Nasution, A.H., (1984). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid I*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution, A.H., (1984). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Nasution, A.H., (1964). *Mengamankan Panji – Panji Revolusi*. Jakarta: Delegasi.
- Simatupang, T.B. (1981). *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soebandrio, H. (2001). *Kesaksianku Tentang G.30-S*. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total.
- Sjamsuddin, (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sundhaussen, ULF. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta:LP3ES.
- Suharsimi, Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Yamin, Moh. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Jakarta:AR-Ruzz media.